

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Taylor & Procter dalam Soelistyarini (2013) tinjauan pustaka atau kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk mengkaji ataupun meninjau kembali berbagi literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka juga merupakan bagian yang menjelaskan lebih dalam terkait variabel-variabel dan landasan teori yang digunakan atau bisa disebut dengan *Grand Theory*.

Didalam tinjauan pustaka ini menjelaskan tinjauan literatur yang didasarkan pada kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka ini akan dibahas dalam dua pembahasan, yang pertama yaitu membahas konsep dasar dari variabel yang diteliti, dan yang kedua akan membahas penelitian terdahulu.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut (Sukirno, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam hal menilai kinerja pada suatu perekonomian, terkhusus dalam hal analisis hasil pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan oleh negara atau oleh suatu daerah. Ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian bisa menghasilkan surplus pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan persamaan berikut :

$$gt = \frac{Yr_t - Yr^{t-1}}{Yr^{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

Gt : Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan dalam persen

Yr_t : Pendapatan nasional pada tahun nasional pada tahun t

Yr_{t-1} : Pendapatan nasional pada tahun sebelumnya

2.1.2 Produk Domestik Bruto

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah barang dan jasanya meningkat. PDB menjadi gambaran ekonomi suatu negara untuk memperkirakan ukuran ekonomi dan tingkat pertumbuhan. Menurut Sukirno (2016), Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam batas wilayah nasional, tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksinya. Produk Domestik

Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu (Mankiw, 2018).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2010) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam batas geografis suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi (*output approach*) yaitu menghitung total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Rumus perhitungannya yaitu :

$$\text{PDB} = \sum (\text{Output} - \text{Input Antara})$$

Keterangan :

Output : Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi

Input Antara : Biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi

2. Pendekatan Pengeluaran (*expenditure approach*) yaitu menghitung total pengeluaran dari seluruh pelaku ekonomi, yaitu :

$$\text{PDB} = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

PDB : Produk Domestik Bruto

C : Konsumsi Rumah Tangga

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

(X - M) : Ekspor Neto (*Net Exports*)

3. Pendekatan Pendapatan (*income approach*) yaitu menghitung total pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan.

$$\text{PDB} = w + r + i + p$$

Keterangan :

w : Upah /Gaji (*Labour/ Income*)

r : Sewa (*Rental Income*)

i : Bunga (*Interest*)

p : Keuntungan Perusahaan (Profit)

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Dari penjelasan di atas, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai faktor - faktor yang dapat menentukan kenaikan output per kapita dalam waktu yang panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme faktor-faktor tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga terbentuk sebuah proses. Maka secara sederhana teori ekonomi adalah suatu cerita atas dasar keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan bisa terjadi.

Sukirno (2006) berpendapat bahwa teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan (Todaro, 2012). Adam Smith menitik beratkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan penduduk. Pada mulanya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif lebih, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka para pelaku ekonomi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan membuahkan investasi baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi keadaan seperti ini tidak akan terus berlangsung apabila jumlah penduduk terus bertambah, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, dan menyebabkan kembali menurunnya kemakmuran masyarakat. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut (Donald, 2017).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini memperkenalkan konsep penting seperti fungsi produksi agregat dan peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Robert Solow (1956) mengemukakan model pertumbuhan yang dikenal dengan nama Model Solow yang menekankan peran akumulasi modal fisik, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam model ini, kemajuan teknologi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori pertumbuhan neoklasik memandangnya dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif penawaran. Menurut teori yang dikembangkan oleh Robert Solow (1956) ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat di nyatakan dengan persamaan :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana,

- ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.
- ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal.
- ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk.
- ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.

Kontribusi terpenting pertumbuhan ekonomi neoklasik bukanlah mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi karena menggunakan teori ini untuk mengetahui peran sebenarnya dari berbagai faktor

produksi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Berdasarkan teori klasik dan neoklasik, banyak penelitian empiris yang dilakukan untuk mengetahui peran berbagai faktor, termasuk faktor teknologi, dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori klasik dan neoklasik berasumsi bahwa teknologi merupakan faktor eksogen dan kebijakan perdagangan pemerintah cenderung bersifat tetap sehingga tidak mempengaruhi teknologi. Artinya, hubungan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat sementara.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang masih dipakai dan terus dikembangkan. Evsey Domar dan Roy Harrod adalah pencetus dari teori ini yang menyatakan bahwa tingginya tabungan dan investasi menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain tabungan dan investasi masyarakat memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti ketika tabungan atau investasi masyarakat atau negara itu rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang (Sukirno, 2010). Dengan menggunakan asumsi seperti barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya, dan perekonomian terdiri dari dua sektor.

Harrod-Domar mendasarkan teorinya pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulan menunjukkan, bahwa pemerintah perlu

merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

Harrod dan Domar menyatakan bahwa peranan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Pertama – tama menciptakan pendapatan yang disebabkan oleh permintaan, selanjutnya memperbesar kapasitas produksi perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan stok modal sebagai dampak penawaran. Karena itu, selama investasi tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat (Sukirno, 2010)

Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material, dan sebagainya) yang telah rusak. Akan tetapi, stok modal perlu ditambah melalui investasi – investasi baru guna meningkatkan laju perekonomian. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal- output (*Capital Output Ratio = COR*) (Arsyad, 2010).

Pada teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod–Domar menekankan bahwa untuk mencapai tingkat *steady growth* pada suatu perekonomian terletak pada peran aktif investasi. Harrod dan Domar menjelaskan bahwa tingkat investasi pada suatu negara mampu memberikan kontribusi besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Hal yang menjadi dasar pemikiran Harrod dan Domar bahwa instrumen investasi memiliki dua peran besar pada perekonomian, yaitu sebagai sumber pendapatan dan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi (Sukirno, 2016).

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Pada umumnya, teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, untuk memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu negara membutuhkan investasi yang tinggi pula. Dana untuk membiayai investasi didapatkan dari tabungan. Permasalahannya, negara sedang berkembang dihadapkan pada adanya kesenjangan antara kebutuhan investasi dan kemampuan mengakumulasi tabungan (*saving-investment gap*). Oleh karena itu, biasanya, solusi yang ditawarkan oleh teori klasik adalah mencari pinjaman, bantuan atau investasi asing. Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri (Todaro, 2012).

Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, pengertian modal di sini bersifat lebih luas, bukan hanya sekadar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (*human capital*) (Arsyad, 2010). Pada tahun 1962, Kenneth J. Arrow seorang pemenang Nobel ekonomi juga telah mengembangkan model pertumbuhan dengan memasukkan sebuah mekanisme yang tidak termasuk dalam faktor produksi maupun investasi yakni mekanisme *learning by doing*. Menurut model Arrow ini, setiap orang dapat memiliki suatu kemampuan lebih secara tiba-tiba sebagai dampak dari proses difusi ilmu pengetahuan yang dialami dalam hidupnya. Selang 34 tahun kemudian, Romer mengungkapkan pemikiran tentang pentingnya penelitian dan pengembangan (R&D) dalam pertumbuhan ekonomi yang kemudian kita kenal sebagai teori pertumbuhan endogen. Selain itu, Romer juga memandang pertumbuhan ekonomi merupakan hasil nyata dari adanya akumulasi di bidang ilmu pengetahuan (Smith, 2012)

Dalam model ini, faktor teknologi memegang peranan penting, namun hal itu bukan berarti bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan tentang fenomena pertumbuhan dalam jangka panjang. Romer juga menyatakan bahwa akumulasi modal tetap memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun dengan definisi yang lebih luas yaitu dengan memasukkan unsur modal ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) dan modal insani (*human capital*) ke dalam model. Selain itu, perubahan teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai faktor yang berasal dari luar model (*exogenous*) (Arsyad,

2010). Fungsi produksi pada model pertumbuhan endogen dapat ditunjukkan oleh formula berikut:

$$Y = f(R, K, H)$$

Dimana,

- Y adalah total output
- R adalah penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam perekonomian
- K adalah akumulasi modal fisik,
- H adalah akumulasi modal insani.

Model pertumbuhan endogen berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi memiliki peran yang lebih luas disamping modal. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menjadi input utama untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan asumsi teknologi bukan hanya bersifat eksogen melainkan endogen (Romer, 1990). Dalam era keterbukaan atau globalisasi merupakan peluang bagi negara berkembang untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sesuai prinsip pada model pertumbuhan endogen. Jika suatu negara menerapkan tingkat keterbukaan perdagangan meningkatkan peluang negara tersebut untuk memperoleh percepatan laju pertumbuhan ekonomi sesuai implikasi model pertumbuhan endogen .

2.1.4 Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI) Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara asing di dalam negeri negara pengimpor modal. PMA dapat dimasukkan dalam

bentuk modal swasta atau modal negara (Jhingan, 2009). *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Investasi Langsung Asing adalah suatu bentuk investasi di mana sebuah perusahaan atau individu dari suatu negara melakukan investasi langsung dalam aset atau perusahaan yang beroperasi di negara lain. FDI melibatkan pengambilan alihan kontrol yang signifikan atas perusahaan yang diinvestasikan, biasanya lebih dari 10% saham perusahaan tersebut. Investasi ini dapat berupa pembelian saham, pembangunan fasilitas baru, atau akuisisi terhadap perusahaan yang sudah ada di negara tujuan investasi. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara, yaitu kerangka kebijakan (stabilitas ekonomi dan politik, perdagangan dan kebijakan pajak, privatisasi), faktor ekonomi, dan fasilitas bisnis di negara tuan rumah (UNCTAD, 2023).

2.1.4.1 Jenis -Jenis *Foreign Direct Investment (FDI)*

Foreign Direct Investment (FDI) yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan :

1. Berdasarkan Bentuk Investasi (Anoraga, 2014)

a) Investasi portofolio

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk perusahaan yang menerbitkan surat berharga belum tentu membuka lapangan kerja baru.

b) Investasi langsung

Investasi langsung atau disebut juga penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan bentuk investasi dengan jalan

membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

2. Berdasarkan Jenis Modal

a) *Greenfield Investment*

Jenis FDI di mana perusahaan asing membangun fasilitas baru dari awal di negara penerima. Ini termasuk pembangunan pabrik, kantor, atau infrastruktur lainnya.

b) *Brownfield Investment*

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk membeli atau mengakuisisi fasilitas yang sudah ada. Ini sering kali lebih cepat dibandingkan dengan greenfield karena perusahaan tidak perlu membangun dari awal.

3. Berdasarkan Tujuan Investasi

a) *Market-Seeking FDI*

Bertujuan untuk memasuki pasar baru dan memperluas pangsa pasar. Investor berusaha untuk menjangkau konsumen baru di negara lain dan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka.

b) *Resource-Seeking FDI*

Bertujuan untuk memperoleh sumber daya alam, bahan baku, atau komponen yang diperlukan untuk produksi. Investor mencari lokasi yang memiliki sumber daya yang lebih murah atau lebih berkualitas.

c) *Efficiency-Seeking FDI*

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif suatu negara, seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau infrastruktur yang lebih baik.

d) *Strategic Asset-Seeking FDI*

Bertujuan untuk memperoleh aset strategis, seperti teknologi, merek, atau keahlian manajerial, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

e) *Diversification-Seeking FDI*

Bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio investasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar atau produk tertentu.

f) *Technology-Seeking FDI*

Bertujuan untuk mendapatkan akses ke teknologi baru atau inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan produksi dan daya saing perusahaan.

4. Berdasarkan Tingkat Kontrol

a) *Wholly Owned Subsidiary*

Bentuk investasi di mana perusahaan asing memiliki 100% saham dari anak perusahaan yang didirikan di negara lain.

b) *Joint Venture*

Bentuk kerjasama di mana dua atau lebih perusahaan (biasanya satu perusahaan asing dan satu perusahaan lokal) membentuk entitas baru dan berbagi kepemilikan serta kontrol.

c) *Majority Ownership*

Jenis investasi di mana investor asing memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lokal, memberikan mereka kontrol mayoritas.

d) *Minority Ownership*

Jenis investasi di mana investor asing memiliki kurang dari 50% saham

perusahaan lokal.

e) *Acquisition*

Ketika perusahaan asing membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lokal, yang dapat mengarah pada pengendalian penuh atau mayoritas.

5. Berdasarkan Sektor Ekonomi

a) Sektor Primer

Sektor primer mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dan pengolahan sumber daya alam. Ini termasuk pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

b) Sektor Sekunder

Sektor sekunder mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan produksi barang, termasuk industri manufaktur dan konstruksi.

c) Sektor Tersier

Sektor tersier mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa, termasuk perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan layanan profesional.

d) Sektor *Quaternary*

Sektor *quaternary* mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan dan informasi, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D), teknologi informasi, dan pendidikan.

e) Sektor *Quinary*

Sektor *quinary* mencakup kegiatan yang berkaitan dengan layanan yang bersifat tinggi dan manajerial, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan

kebudayaan.

6. Berdasarkan Asal Negara

a) *Inbound*

Merujuk pada investasi asing langsung yang masuk ke suatu negara dari investor asing. Dalam konteks ini, investor dari negara lain melakukan investasi di negara tujuan, yang dapat berupa pendirian perusahaan baru, akuisisi perusahaan lokal, atau pembelian aset.

b) *Outbound*

Merujuk pada investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke negara lain. Dalam konteks ini, investor domestik melakukan investasi di luar negeri untuk memperluas pasar, mengakses sumber daya, atau meningkatkan efisiensi operasional.

2.1.4.2 Teori *Foreign Direct Investment (FDI)* Menurut Para Ahli

1. Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*).

Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Adapun faktor yang mendukung pandangan teori klasik dan neo klasik, yaitu:

- a) Pertama, merupakan fakta bahwa modal asing yang dibawa ke negara pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestic yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Masuknya modal dan penanaman modal asing kembali oleh penanaman modal

asing yang berasal dari keuntungan yang tidak dikembalikan ke negaranya, akan meningkatkan tabungan dari negara penerima modal. Penghasilan pemerintah melalui pajak meningkat dan pembayaran-pembayaran lain juga akan meningkat.

- b) Kedua, Penanaman modal asing biasanya membawa serta teknologi yang terdapat di negara pemilik modal dan menyebarkan teknologi tersebut di dalam negara penerima modal.
- c) Ketiga, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya lapangan baru. Tanpa penanaman modal asing kesempatan untuk bekerja tidak akan didapat.
- d) Keempat, pekerja-pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan penanaman modal asing akan mendapatkan keahlian sehubungan dengan teknologi yang dibawa dan diperkenalkan oleh penanam modal asing. Keahlian dalam bidang manajemen dari proyek-proyek besar akan beralih kepada tenaga ahli lokal.
- e) Kelima, fasilitas-fasilitas infrastruktur akan dibangun baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanaman modal asing dan semua fasilitas seperti transportasi, kesehatan, pendidikan yang diperuntukkan bagi penanaman modal asing akan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Ekletik

Menurut Dunning (1987) terdapat tiga karakteristik utama minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Tiga karakteristik tersebut biasa disebut dengan *The OLI Paradigm* antara lain :

- 1) *Ownership Advantage*, yaitu perusahaan memiliki teknologi atau keterampilan spesifik yang mampu menjadikan perusahaan tersebut lebih unggul

dibandingkan perusahaan lain. Keunggulan kepemilikan merujuk pada aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikannya keunggulan kompetitif di pasar internasional. Aset ini bisa berupa teknologi canggih, merek yang kuat, keterampilan manajerial yang unggul, atau kemampuan untuk berinovasi lebih cepat daripada pesaing. Dalam konteks FDI, keunggulan ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan posisi dominannya di pasar global, meskipun beroperasi di luar negeri.

- 2) *Location Advantage*, yaitu keunggulan yang dimiliki oleh suatu lokasi tertentu namun keunggulan tersebut tersedia untuk semua investor. Keunggulan lokasi berkaitan dengan faktor-faktor yang membuat suatu lokasi atau negara menjadi lebih menarik untuk dijadikan tempat bagi perusahaan melakukan investasi langsung. Faktor-faktor ini bisa mencakup biaya tenaga kerja yang lebih rendah, akses ke pasar yang besar, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang baik, serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing. Keunggulan lokasi ini memberikan insentif tambahan bagi perusahaan untuk memilih negara tertentu sebagai tempat operasi dan investasi mereka.
- 3) *Internalization Advantage* yaitu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari disadvantage ataupun kapitalisasi sumber daya alam (ketidaktepatan informasi pasar) yang bisa menghambat kompetisi dengan cara melakukan internalisasi. Keunggulan internalisasi menjelaskan alasan mengapa perusahaan memilih untuk mengelola dan mengontrol operasi di luar negeri secara langsung melalui FDI, daripada mengandalkan metode alternatif seperti lisensi atau *franchise*. Internalization memungkinkan perusahaan untuk

menghindari biaya transaksi dan masalah pengawasan yang timbul dari perjanjian eksternal.

Selain itu, Dunning juga menjelaskan bahwa terdapat tiga motif yang mendasari investor melakukan investasi, yaitu :

- 1) *Resource Seeking* yaitu investor melakukan investasi di negara lain yang mempunyai faktor produksi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan faktor produksi di negaranya.
- 2) *Market Seeking* yaitu investor berinvestasi dengan tujuan untuk mencari pasar baru atau mempertahankan pasar yang lama.
- 3) *Efficiency Seeking* yaitu investasi yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh manfaat dari ketersediaan dan biaya produksi yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan dari ukuran pasar di negara tujuan investasinya sehingga mencapai efisiensi dalam produksinya.

2. Teori *Integrative School*

Integrative school adalah pendekatan yang mencoba menawarkan pemikiran kategoris determinan FDI dengan cara menganalisis dari dua perspektif yaitu *host country* dan *home country*. Lebih lanjut bahwa teori eklektik menjelaskan internalisasi teori organisasi industri merupakan teori yang menjelaskan determinan FDI dari sudut pandang investor. Sedangkan teori pasar sempurna dan institutional FDI fitness lebih menjelaskan determinan FDI dari perspektif pasar bebas. Teori *integrative school* cenderung lebih banyak berkontribusi dalam menjelaskan determinan FDI dari perspektif *host country*. Teori *integrative school* mempertimbangkan variabel makro, mikro dan meso ekonomi. Variabel makro

meliputi ekonomi secara keseluruhan, variabel mikro menunjukkan aktivitas perusahaan dan variabel meso mencerminkan kebijakan sektoral pemerintah yang terkait dengan bisnis dan investasi.

2.1.5 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional terjadi akibat adanya *trade openness* pada negara. Secara umum, perdagangan terjadi di dasari dari adanya pemenuhan kebutuhan penduduk yang tidak tercukupi oleh negara tersebut. Dalam kaitannya, perdagangan internasional dapat terlihat dari kondisi *trade openness* atau keterbukaan perdagangan negara terkait.

Perdagangan internasional terjadi karena tidak semua barang dan jasa dimiliki oleh semua negara, sehingga setiap orang bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya (Case & Fair, 2007). Akibatnya, perdagangan internasional dihasilkan dari faktor penawaran (perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas, cara menggabungkan faktor produksi dalam proses manufaktur, atau perbedaan produksi) dan faktor permintaan (permintaan barang atau jasa yang didorong oleh selera dan pendapatan) yang dapat menyebabkan perbedaan harga. Oleh karena itu, istilah “perdagangan internasional” mengacu pada pertukaran barang dan jasa di pasar global antar negara.

2.1.5.1 Teori Perdagangan Internasional

Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*) dari Adam Smith dan Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari David Ricardo adalah dua teori utama yang membentuk teori klasik perdagangan internasional.

1) Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage Theory*)

Menurut gagasan Adam Smith tentang keunggulan absolut, negara dapat berspesialisasi dalam barang yang efisien untuk mengekspor dan mengimpor barang yang kurang efisien. Jika suatu negara berfokus pada produk yang menggunakan sumber daya yang sama tetapi dengan harga lebih rendah dari negara lain, negara tersebut dianggap memiliki keunggulan absolut (Yuslian, 2021). Smith melihat kemampuan suatu negara untuk menghasilkan komoditas dan jasa, atau kapasitas produksinya, sebagai tanda kesejahteraannya. Terdapat asumsi dalam teori ini, yaitu:

1. Hanya dua negara, seperti negara X dan Y, yang akan melakukan perdagangan satu sama lain.
2. Hanya dua produk, seperti komoditas A dan B, yang dapat dibuat.
3. Tenaga kerja adalah satu-satunya input yang digunakan dalam produksi barang-barang ini, dan tenaga kerja di suatu negara dianggap homogen atau bergerak sempurna.

2) Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage Theory*)

Meskipun tidak memiliki efisiensi produk, suatu negara tetap dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan di wilayah di mana keunggulan absolutnya buruk, menurut teori keunggulan komparatif David Ricardo. Dengan

menekankan pembuatan dan ekspor barang-barang dengan kerugian absolut yang lebih kecil dan mengimpor barang-barang dengan kerugian absolut yang lebih besar, suatu negara dapat menghindari hal ini (Yuslian, 2021). Menurut Adam Smith, negara-negara tanpa keunggulan absolut tidak dapat berdagang, tetapi menurut David Ricardo, perdagangan dapat berjalan selama masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif.

2.1.6 Trade Openness

Trade openness (keterbukaan perdagangan) mengacu pada sejauh mana suatu negara membuka ekonominya untuk perdagangan internasional, baik berupa ekspor maupun impor barang dan jasa. Keterbukaan perdagangan sering diukur menggunakan rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan kontribusi perdagangan terhadap perekonomian suatu negara.

Menurut World Bank dalam *www.worldbank.org* (2015), *Trade Openness* (TO) yang dinyatakan pada data *trade (% of GDP)* adalah rasio jumlah ekspor dan impor barang dan jasa dengan negara-negara lain yang diukur sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB). Teori murni perdagangan internasional (*The Pure Theory of Trade*) merupakan teori yang membahas tentang dasar terjadinya perdagangan dan keuntungan yang diperoleh dari suatu perdagangan. Teori murni perdagangan internasional terdiri dari teori Keunggulan Mutlak (*Absolut Advantage*) oleh Adam Smith dan teori Keunggulan Komparatif (Hukum keunggulan Komparatif) oleh David Ricardo (Salvatore, 2014). *Trade openness* merupakan jumlah nilai ekspor dan impor terhadap PDB, untuk menilai kinerja

perdagangan suatu negara. Menurut World Bank (2015), *Trade Openness* (TO) disajikan dalam bentuk persentase :

$$\text{Trade Openness} = \frac{\text{Ekspor} + \text{Impor}}{\text{Gross Domestic Product}} \times 100 \%$$

Dengan membatasi atau melonggarkan kontak antar negara, keterbukaan ekonomi merupakan alat kebijakan untuk mengatur arus modal internasional dan barang dan jasa (Yanikkaya, 2003). Tujuan pelaksanaan kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pergerakan ekonomi. Ada dua arah keterbukaan ekonomi global. Pergerakan produk dan jasa diatur oleh keterbukaan perdagangan. Keterbukaan keuangan adalah faktor kedua dalam mengelola arus global. Kegiatan *Trade Openness* menciptakan 47 keunggulan tiap negara, yang nantinya akan melakukan spesialisasi produksi dan meningkatkan kondisi produksi di negara tersebut.

Keterbukaan perdagangan yang ditandai dengan perdagangan internasional yang semakin terbuka memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas kegiatan produksi dalam negeri, serta spesialisasi produksi yang dapat terjadi antar negara telah meningkat.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja, negara pengekspor dapat meningkatkan produksi untuk konsumsi ekspor karena perdagangan antara mereka menjadi lebih terbuka. Kesempatan kerja akan meluas sebagai akibat dari kenaikan tingkat produksi ini. Negara-negara yang mengimpor barang juga diuntungkan, karena mereka tidak dapat memproduksi barang yang dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk usaha yang lebih menguntungkan.

- c. Salah satu sumber penerimaan kas negara atau devisa adalah dari bea masuk, pajak, dan pungutan lainnya yang terkait dengan ekspor dan impor.
- d. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, khususnya di sektor industri, dapat membantu memproduksi lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat seiring perkembangan teknologi baru.
- e. Meningkatkan kerjasama internasional dan ikatan persaudaraan. Ekspansi ekonomi suatu negara dapat didorong oleh kerja sama.

2.1.6.1 Dampak *Trade Openness* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini merupakan dampak positif dan dampak negatif tentang perdagangan internasional yang semakin terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu:

1. Dampak Positif

Menurut Malik (2017) dampak positif dari semakin terbukanya perdagangan internasional antara lain :

- a) Terbentuknya hubungan persahabatan antar-negara, perdagangan antar negara bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lainnya. Apabila hubungan antar negara berjalan dengan baik, besar kemungkinan kerja sama keduanya akan berkembang ke banyak sektor dan tidak terbatas dalam perdagangan.
- b) Menciptakan efisiensi dan spesialisasi, berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat satu negara memiliki spesialisasi dalam satu sektor ekonomi. Dalam artian, negara maupun penduduknya akan memiliki keahlian

khusus yang berbeda dengan negara lainnya dalam menghasilkan produk barang dan jasa.

- c) Meningkatkan kemakmuran negara, indikator kemakmuran sebuah negara bisa dilihat dari aktifitas pelaku ekonomi meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, akan membawa kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi tersebut. Para produsen akan mengalami kemakmuran jika bisa meningkatkan profit yang dimiliki dengan menggerek angka penjualan barang atau jasa keberbagai negara dengan sedikit hambatan tarif atau pun non tarif. Sedangkan bagi konsumen, akan mengalami kemakmuran bila telah mampu meningkatkan utility dengan meningkatkan konsumsi tanpa terhalang kesulitan memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negara. Pemerintah juga mendapat keuntungan jika melakukan perdagangan internasional karena sumber pemasukan devisa negara akan semakin meningkat apabila nilai ekspor semakin tinggi.
- d) Berkurangnya pengangguran, Apabila pasar perdagangan luar negeri semakin meluas maka kegiatan produksi barang ataupun jasa disuatu Negara juga akan semakin meningkat. karena hal ini, kebutuhan akan tenaga kerja juga ikut meningkat di berbagai sektor. Jika hal itu terjadi, dengan sendirinya angka pengangguran juga semakin berkurang.
- e) Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Perdagangan Internasional juga berperan sebagai alat mobilisasi IPTEK, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional akan memungkinkan suatu negara mengeksport barang yang berbasis kecanggihan teknologi seperti mesin

dan alat-alat modern pada negara yang lebih membutuhkan. Maka dengan demikian, akan semakin cepat mobilisasi teknologi pada negara pengimpor tersebut.

- f) Menstabilkan Harga, Perdagangan internasional secara tidak langsung juga bisa mengendalikan harga yang terdapat dipasar domestik suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang yang mengakibatkan harga mahal bisa diatasi melalui impor untuk menambah stock di pasar domestik. Sebaliknya apabila negara memiliki stok berlebih yang menyebabkan harga barang menjadi murah maka kegiatan ekspor bisa dilakukan untuk mengurangi barang.

2. Dampak Negatif

Menurut Malik (2017) dampak negatif dari semakin terbukanya perdagangan internasional antara lain :

- a) Produk dalam negeri semakin menurun, adanya perdagangan internasional ini akan turut menimbulkan persaingan industri antar-negara. Apabila industri disuatu negara memiliki kualitas produksi barang yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Ini karena konsumen cenderung mencari barang dengan kualitas bagus dan harga terjangkau.
- b) Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain salah satu contohnya yaitu munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju.

- c) Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran di suatu negara.
- d) Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri terutama industri kecil di suatu negara mengalami kerugian

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mankiw (2018) Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan lokal untuk membeli barang dan jasa sebagai bagian dari pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam konteks ekonomi makro, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan: $Y = C + I + G + (X-M)$ (Dumairy, 2006).

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat

melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Adapun kategori pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.1.7.1 Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Kementrian Keuangan (2018), pengeluaran pemerintah (belanja negara) diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Pengeluaran untuk kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti belanja operasional kantor, belanja bahan, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

d. Pembayaran Bunga Utang

Pengeluaran untuk pembayaran bunga atas utang pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

e. Subsidi

Pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan atau masyarakat untuk menekan harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat luas, seperti subsidi energi dan pangan.

f. Belanja Hibah

Pengeluaran dalam bentuk transfer yang bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak mengikat, yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau perusahaan negara/daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

g. Bantuan Sosial

Pengeluaran yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, seperti bantuan kepada korban bencana alam atau bantuan tunai langsung.

h. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja di atas, yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti pengeluaran untuk keperluan darurat atau tak terduga.

2.1.7.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Teori makro pengeluaran pemerintah oleh Mangkoesoebroto (2001) dibedakan menjadi tiga golongan, yakni teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, teori Adolf Wagner, dan teori Peacock & Wiseman.

a) Teori Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori ini merupakan salah satu teori makro pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, sehingga juga sering disebut sebagai Teori Rostow dan Musgrave. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut yang mana ketiga tahapan tersebut kemudian dihubungkan dengan pengeluaran pemerintahnya. Pada tahap awal, perbandingan antara pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dengan pendapatan nasional (*national income*) terbilang cukup besar. Hal ini dikarenakan pemerintah harus melakukan investasi agar dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga transportasi. Pada tahap kedua, yakni tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi yang dilakukan oleh swasta mulai berkembang pesat sehingga pemerintah tetap perlu melakukan investasi agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyaknya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*). Akibatnya pemerintah harus menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, Rostow mengatakan bahwa terjadi perpindahan pada aktivitas pemerintah dari penyediaan sarana prasarana ke belanja pemerintah untuk kegiatan sosial (Mangkoesebroto dalam Zulfirmanasyah, 2002). Sementara itu, Musgrave mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, rasio antara investasi swasta terhadap GNP (*Gross National Product/Produk Nasional Bruto*) nya akan semakin besar, tetapi rasio antara investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tahap ini, terjadi peningkatan permintaan terhadap barang-barang pribadi seperti mobil atau motor karena penghasilan masyarakat yang semakin besar (Nahumuri, 2019).

b) Teori Adolf Wagner

Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom berkebangsaan Jerman, Adolf Wagner. Dalam teorinya, Wagner mengatakan bahwa semakin lama belanja yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Pemikirannya ini didasari atas penelitian empiris yang dilakukannya pada negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat pada abad ke-19 serta didasarkan pada suatu teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang memandang pemerintah sebagai individu yang memiliki kuasa untuk bertindak bebas dari anggota masyarakat lainnya. Atas penelitian tersebut ia menemukan bahwa belanja pemerintah terus mengalami peningkatan terutama karena pemerintah harus mengatur kegiatan/hubungan/aktivitas yang ada dalam Masyarakat (Idris, 2018). Hubungan-hubungan seperti pendidikan, kebudayaan, hukum, rekreasi, dan sebagainya merupakan kepentingan yang harus diatur oleh pemerintah, sebab di negara maju ketika terjadi kegagalan pasar, maka bisa saja kegagalan dari suatu industri menimpa industri lain yang saling berkaitan di negara tersebut (Gulo, 2017).

Teori Wagner ini juga dikenal dengan sebutan Hukum Wagner. Hukum Wagner dapat dituliskan dengan rumus:

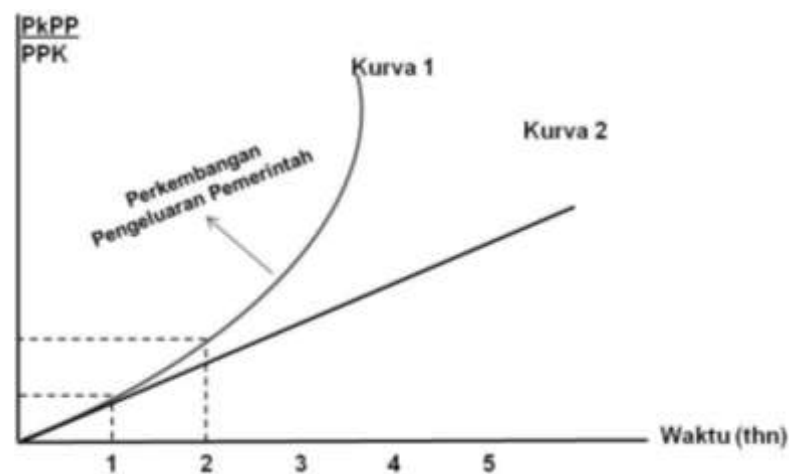
$$\frac{PkPP_1}{PPK_1} < \frac{PkPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{PkPP_n}{PPK_n}$$

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita

1,2,...n : Jangka Waktu (tahun)

Sementara itu, kurva mengenai peningkatan belanja pemerintah yang digambarkan oleh Wagner dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber :Mangkoesoebroto (2001)

Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintahan

Menurut Mangkusubroto (2001) sumbu vertikal (PkPP/PPK) yaitu menggambarkan rasio antara Pengeluaran Pemerintah per Kapita (PkPP) terhadap Pendapatan per Kapita (PPK), sedangkan sumbu horizontal yaitu menunjukkan jangka waktu (tahun). Kemudian untuk Kurva 1 (eksponensial dan cembung ke atas) yaitu menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan per kapita seiring waktu, sementara untuk Kurva 2 menggambarkan kondisi dimana pertumbuhan pengeluaran pemerintah tetap terjadi, namun dengan laju yang lebih lambat dan stabil, sebagaimana umumnya terjadi di negara maju. Ini mencerminkan Hukum Wagner, yang menyatakan bahwa

saat suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, maka permintaan masyarakat terhadap layanan publik meningkat (misalnya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur), sehingga pemerintah cenderung meningkatkan pengeluarannya.

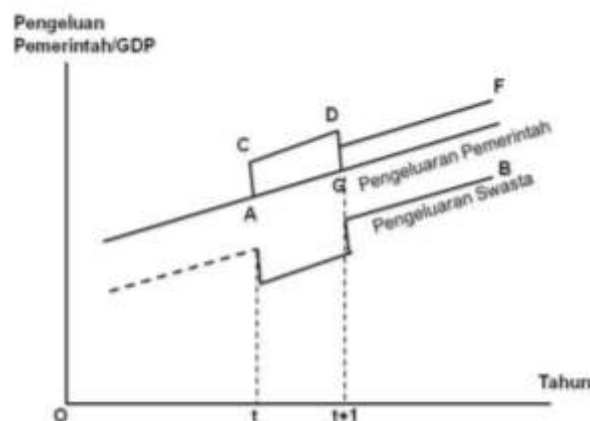
c) Teori Peacock & Wiseman

Dalam teori ini Peacock dan Wiseman mengutarakan sebuah teori pengeluaran pemerintah yang lebih memperhatikan pola waktu, karena perkembangan pengeluaran pemerintah tidaklah bersifat *continuous growth*, tetapi mirip dengan rumah tangga (*step like*). Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, padahal hal tersebut sangat tidak disukai oleh masyarakat. Namun, Peacock dan Wiseman berpegang pada teori dimana pada titik tertentu masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi terhadap pajak, sehingga meskipun pajak yang dipungut oleh pemerintah cukup besar, tetapi pada tingkatan tertentu mereka bersedia membayar pajak tersebut. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus berhati-hati karena apabila jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melebihi batas toleransi masyarakat, maka masyarakat akan cenderung enggan untuk membayar pajak tersebut (Nahumuri, 2019).

Kesimpulan atas teori ini adalah bahwa meskipun tarif pajak yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, tetapi pertumbuhan ekonomi menyebabkan pajak yang dipungut oleh pemerintah semakin meningkat. Semakin meningkatnya penerimaan negara ini maka akan menyebabkan pengeluaran negara juga akan naik. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan peningkatan pada pengeluaran pemerintah, yakni:

1. Efek Penggantian (*Displacement Effect*), yang merupakan suatu gangguan sosial yang mengakibatkan teralihnya aktivitas swasta ke aktivitas pemerintah, seperti terjadinya perang.
2. Efek Inspeksi (*Inspection Effect*), yang merupakan kegiatan pengembalian pinjaman dan aktivitas baru pasca perang.
3. Efek Konsentrasi (*Concentration Effect*), yang merupakan gangguan sosial yang menyebabkan terjadinya perpindahan fokus aktivitas dari yang sebelumnya dilakukan oleh swasta ke pemerintah. Setelah perang usai dan situasi kembali normal, maka tingkat pajak akan kembali turun (Idris, 2018).

Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar kurva 2.3 sebagai berikut :



Sumber : Mangkoesoebroto (1997) dalam Prasetya (2012)

Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

Keterangan : Dalam keadaan normal dari tahun t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap PDB mengalami kenaikan seperti yang ditunjukkan oleh garis AG. Apabila diasumsikan pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar AC, maka kenaikannya seperti yang ditunjukkan pada garis CD. Pada tahun $t+1$ ketika perang telah selesai, namun pengeluaran

pemerintah hanya turun menjadi garis F dan bukan turun ke G, yaitu tingkat pengeluaran pemerintah apabila tidak terjadi perang. Hal ini terjadi karena setelah perang pemerintah memerlukan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam membiayai perang. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi masyarakat, sehingga tingkat toleransi pajak naik dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat.

2. Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah

Menurut Nasution (2018) mengemukakan bahwa jika dalam teori makro pengeluaran pemerintah dapat dituangkan dalam beberapa model dan digunakan untuk menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, maka dalam teori mikro, pengeluaran pemerintah lebih bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan atas barang publik dan faktor yang memengaruhi tersedianya barang publik tersebut. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan kualitas barang publik
2. Perubahan permintaan akan barang publik
3. Perubahan harga faktor produksi
4. Perubahan kegiatan pemerintah dalam memproduksi dan menghasilkan barang publik

2.1.8 Nilai Tukar

Nilai tukar atau kurs secara sederhana dapat di artikan sebagai harga mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Menurut Hasibuan (2005) kurs adalah

alat perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara.

Suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka harus mempertimbangkan kurs mata uangnya dalam menganalisa kondisi makroekonomi negara yang bersangkutan. Kurs dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara tersebut (Mankiw, 2018).

Menurut Krugman dan Obstfeld (2009) mengartikan nilai tukar sebagai rasio yang menentukan bagaimana mata uang dari dua negara dapat dipertukarkan. Mereka menekankan bahwa nilai tukar memengaruhi arus perdagangan barang dan jasa serta aliran modal antarnegara. Kemudian menurut Dominick Salvatore (2004), nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam kaitannya dengan mata uang negara lain, yang dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar valuta asing.

2.1.8.1 Jenis – Jenis Nilai Tukar

Menurut Sukirno (2010) jenis nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:

1. *Selling Rate* (Kurs Jual)

Kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.

2. *Middle Rate* (Kurs Tengah)

Kurs tengah antar kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu.

3. *Buying Rate* (Kurs Beli)

Kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.

4. *Flat Rate* (Kurs Rata)

Kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank *notes* dan *travellers cheque*.

2.1.8.2 Teori Nilai Tukar

Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) atau teori paritas tingkat harga yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi swedia, Gustav Cassel. Teori ini agak berbeda dengan pendekatan sebelumnya, teori ini berusaha untuk menghubungkan nilai tukar dengan daya beli valuta tersebut terhadap barang dan jasa suatu negara yang memerlukan mata uang asing untuk melakukan perdagangan luar negeri. Untuk mengetahui perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain ditentukan daya beli mata uang tersebut terhadap barang dan jasa masing masing negara. Pendekatan ini menggunakan apa yang disebut *Law of One Price*. Dalam teori ini disebutkan bahwa dengan asumsi tertentu, dua barang yang identik (sama dalam segala hal) harusnya mempunyai harga yang sama.

2.1.8.3 Sistem Nilai Tukar

Terdapat 3 (tiga) sistem nilai tukar yang dapat ditentukan oleh Bank Sentral di suatu negara untuk ditetapkan sebagai sistem nilai tukar yang berlaku yaitu:

1. Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchanged Rate*)

Sistem nilai tukar dimana nilai kurs suatu negara ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar. Indonesia menganut sistem kebijakan ini sejak tahun 1998 hingga saat ini. Dalam sistem ini, otoritas moneter dapat saja melakukan intervensi pasar dalam mengendalikan nilai mata uang domestik dengan membeli atau menjual devisa untuk mengendalikan penawaran, akan tetapi intervensi ini tidak diarahkan untuk mencapai target nilai tukar tertentu.

2. Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchanged Rate*)

Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, otoritas moneter memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi sistem ini adalah sebagai “penyempurnaan” sistem mengambang bebas bagi negara yang tidak ingin nilai tukarnya terus merosot. Dengan adanya intervensi pemerintah, maka nilai tukar mata uang tidak terus turun.

3. Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchanged Rate*)

Kebijakan nilai tukar yang digunakan oleh Bank Sentral suatu negara untuk menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu atau asing terhadap mata uangnya atau domestik. Dalam sistem ini, otoritas moneter memiliki kewenangan untuk melakukan devaluasi mata uang domestik terhadap mata uang asing dan menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Pengaruh *Foreign Direct Investment, Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002-2023”.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fitria Sari, dan Taufiq C. Dawood, 2022. Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> , Remitansi Kredit, Keterbukaan Perdagangan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB ASEAN	<i>Foreign Direct Investment</i> , Keterbukaan Perdagangan ,Pengeluaran Pemerintah	Remitansi Kredit	<i>Foreign Direct Investment</i> berpengaruh positif signifikan terhadap PDB, Keterbukaan Perdagangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDB	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembanguna n (JIM EKP) Universitas Syiah Kuala, <i>Volume 7</i> , No. 4 November 2022, <i>Pages</i> 2549- 296 ISSN. 2549- 8363

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Desi Wulandari, Khalid Fauzi Aziz, Retno Muslinawati, 2023. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Keterbukaan Perdagangan, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i> , Keterbukaan Perdagangan, Kurs (Nilai Tukar)	Inflasi	Investasi Asing Langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap PDB, Keterbukaan Perdagangan berpengaruh signifikan terhadap PDB, dan Kurs (Nilai Tukar) berpengaruh signifikan terhadap PDB	Jurnal Proaksi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro, <i>Volume. 10, No. 4, Pages 610-627</i>
3.	Kharazi, Ikbar Allam Nuraini, Ida, 2024. Analisis Keterbukaan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	<i>Foreign Direct Investment</i> , Pengeluaran Pemerintah	Hutang Luar Negeri	Pengeluaran pemerintah berdampak secara signifikan terhadap PDB, sementara investasi asing tidak berdampak secara signifikan terhadap PDB	Jurnal Simki <i>Economic</i> , Volume 7 <i>Pages 211-223</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Jimmy Nova Anom, Poernomo Adi Winarto, Hari, 2020. Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	<i>Foreign Direct Investment</i>	Utang Luar Negeri dan Ekspor	<i>Foreign Direct Investment</i> jangka pendek mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi jangka pendek dan jangka panjang variabel FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 2020, Volume 17 Pages 128-141 ISSN:1411-1977
5.	Anisya Gretsya Bambang, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandei, 2021. Analisis Pengaruh Ekspor Impor Utang Luar Negeri Dan Penanaman modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013:Q1-2018:Q4	Penanaman Modal Asing (<i>Foreign Direct Investment</i> ,	Ekspor, Impor, dan Utang Luar Negeri	Penanaman Modal Asing (<i>Foreign Direct Investment</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2021, Volume 9 Pages 848-860 ISSN:2303-1774

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Merlin Kristin Zebua, Idris, 2024. Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Keterbukaan Perdagangan , Penanaman Modal Asing, Nilai Tukar Riil	Metode Penelitian	Keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan pada PDB, Penanaman Modal Asing berpengaruh positif signifikan terhadap PDB, dan Nilai Tukar Riil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDB	Jurnal Proaksi, Universitas Bojonegoro Volume 10(4) <i>Pages</i> 610-627 DOI: 10.32534/jpk.v10i4.4976
7.	Fredi Setyono, Dian Prihatiningtyas, Muhammad Ghafur Wibowo, 2023. Pengaruh Utang Luar Negeri dan <i>Foreign Direct Investment</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Organisasi Konferensi Islam	<i>Foreign Direct Investment</i>	Utang Luar Negeri	Variabel <i>Foreign Direct Invesment</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)	Jurnal Orientasi Bisnis dan <i>Entrepreneur ship</i> UIN Sunan Kalijaga, Vol. (4) No. (1) ISSN : 2722-7995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Ajeng Lestari, Ibnu Muhdir, Nesha Rizky Ashari, 2024, <i>Asean Economic Dynamics: An Analysis of The Impact of Trade Openness, Foreign Direct Investment, and Export on Economic Growth</i>	<i>Trade Openness, Foreign Direct Investment</i>	<i>Export dan Metode Analisis Data</i>	Variabel <i>Trade Openness</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap GDP di 10 Negara ASEAN Variabel <i>Foreign Direct Investment</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap GDP di 10 Negara ASEAN	Jurnal Ekonomi Pembanguna n Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, Volume 22, No. 02, <i>Pages</i> 104- 115
9.	Stevia Manopode, Amran Naukoko, Dennij Mandej, 2019. Analisis Pengaruh Aliran Investasi Asing dan Perdagangan Internasional Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia (2013.I- 2017.IV)	<i>Foreign Direct Investment</i>	Ekspor dan Impor	<i>Foreign Direct Investment</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, 2019, <i>Volume</i> 19, No. 02 <i>Pages</i> 94-107

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Yuni Revita , Hastuti, Pebri, Maharani Nidia, 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2005-2018	Keterbukaan Perdagangan dan Pengeluaran Pemerintah	Perbedaan Sektor (Pendidikan dan Kesehatan)	Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap PDB, Keterbukaan Perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap PDB	Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Universitas Negeri <i>Medan</i> <i>Volume 3</i> , No. 5 Desember 2019
12.	Vinsesius, Prihat Assih, Gaguk Apriyanto, 2021. Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS dan Utang Negara Terhadap Indeks Harga Sham Gabungan (IHSG) dan Implikasinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.	Nilai Tukar	Utang Negara	Nilai Tukar Rupiah atas Dollar AS berpengaruh positif signifikan terhadap PDB.	Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi STIE Kesuma Negara, <i>Volume 6</i> , No. 1, Januari 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Juni Mashita, 2023. Analisis Determinan Produk Domestik Bruto di Indonesia Periode 2015-2022)	Pengeluaran Pemerintah, Investasi Modal Asing	Inflasi, Ekspor, Impor	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, Investasi Modal Asing berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia periode 2015-2022 .	<i>Journal of Innovation Research and Knowledge</i> Universitas Indraprasta PGRI, <i>Volume 3</i> , No. 7 Desember 2023
14.	Bambang Ismanto, Lelahester Rina, Mita Ayu Kristini, 2019. Pengaruh Kurs dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2007-2017	Kurs (Nilai Tukar)	Impor	Kurs (Nilai Tukar)berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia periode 2007-2017	Artikel Universitas Kristen Satya Wacana Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Khoirul Ifa, Fitria Ardiansyah, 2019. Analisis Hubungan <i>Foreign Direct Investment</i> , Ekspor, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Menggunakan <i>Vector Autoregression (Var)</i> .	<i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> dan Pengeluaran Pemerintah	Ekspor, dan Metode Analisis Data	Terdapat hubungan antara FDI terhadap GDP. Tidak terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap FDI namun terdapat hubungan antara FDI terhadap pengeluaran pemerintah.	<i>Journals of Economics Development Issues (JEDI)</i> , 2019, Volume 2 No. 1 e-ISSN : 2614-2384

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori atau konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Didalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut penulis akan menyajikan kerangka pemikiran penelitian yang berjudul “Pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002-2023”.

2.2.1 Pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) Terhadap Produk Domestik Bruto

Dalam pembangunan ekonomi, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Foreign Direct Investment (FDI)* sangat penting bagi transisi ekonomi, karena FDI dapat meningkatkan teknologi dan modal yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. FDI sering membawa masuk modal dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Teknologi yang lebih maju memungkinkan perusahaan-perusahaan lokal untuk memproduksi barang dan jasa dengan lebih efisien, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan PDB. Misalnya, masuknya perusahaan-perusahaan asing dalam sektor manufaktur atau teknologi dapat meningkatkan produksi, yang akan menambah output nasional.

Menurut penelitian oleh Fitria Sari dan Taufiq C. Dawood (2022) bahwa FDI berpengaruh positif serta signifikan secara statistik bagi PDB di ASEAN.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fredi Setyono, Dian Prihatiningtyas dan Muhammad Ghafur Wibowo (2023) bahwa variabel *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau GDP di negara Organisasi Konferensi Islam (OKI).

2.2.2 Pengaruh *Trade Openness* Terhadap Produk Domestik Bruto

Keterbukaan perdagangan memungkinkan Indonesia untuk mengeksport produk-produk unggulannya ke pasar global, terutama sektor seperti komoditas, manufaktur, dan produk pertanian. Ini meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja.

Menurut penelitian oleh Merlin Kristin Zebua dan Idris (2024) bahwa hasil analisis deskriptif dan analisis induktif berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa *Trade Openness* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Produk Domestik Bruto.

Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Nova Ano, Nazaruddin Malik, dan M. Sri Wahyudi (2019) bahwa variabel Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator *Gross Domestic Product* (GDP). Kebijakan perdagangan internasional seperti tarif atau subsidi perlu penyesuaian untuk melindungi industri domestik sampai mereka cukup kompetitif di pasar global, mengingat hubungan negatif keterbukaan perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia terutama mengeksport komoditas primer, yang harganya sangat rentan terhadap guncangan harga di seluruh dunia, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan pertumbuhannya stabil, Indonesia harus memiliki mekanisme penyeimbang yang kuat, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

2.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto

Pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk investasi untuk berbagai sektor. Investasi semacam itu tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung dalam pembangunan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Menurut penelitian oleh Ikbar Allam Kharazi1 dan Ida Nuraini bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Gross Domestic Product (GDP)*. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Didukung juga penelitian oleh Dyah Ayu Mustika Rini dan Herry Yulistiyo (2021) bahwa dalam jangka panjang dan pendek berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah bersamaan dengan meningkatnya penerimaan negara. Teori Peacock dan Wisman menyatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan negara dan pengeluaran pemerintah meningkat. Selain sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah, hasil penelitian ini sesuai dengan konsep ekonomi makro dimana pengeluaran pemerintah akan mendorong perekonomian nasional dengan asumsi pengeluaran pemerintah sepenuhnya digunakan untuk mendorong perkembangan aktivitas dan kegiatan ekonomi.

2.2.4 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto

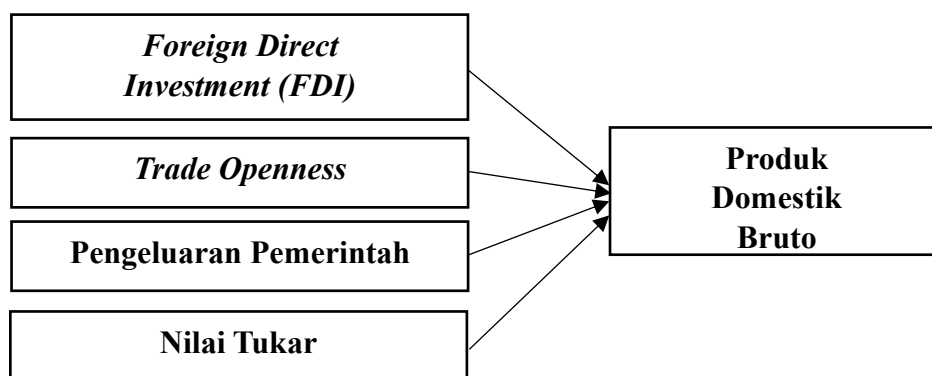
Hukum permintaan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara permintaan dan harga, semakin tinggi harga komoditas maka semakin rendah kuantitas permintaan terhadap komoditas tersebut. Sebaliknya semakin rendah harga komoditas akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas tersebut dengan asumsi *ceteris paribus*. Harga yang dimaksud adalah nilai tukar rupiah

terhadap dollar AS sedangkan permintaannya adalah impor dari negara yang bersangkutan. Jika nilai tukar rupiah meningkat atau terdepresiasi terhadap dolar maka impor cenderung menurun, sebaliknya jika nilai tukar menurun atau terapresiasi terhadap dolar maka impor akan meningkat. Ketika nilai tukar rupiah meningkat maka permintaan impor menurun dan permintaan dalam negeri naik sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat.

Menurut penelitian oleh Vinsesius, Prihat Assih, dan Gaguk Apriyanto (2021) bahwa Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS berpengaruh positif signifikan terhadap PDB Indonesia.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, dkk. (2019) bahwa Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan indikator PDB.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Ketut dalam Zaki & Saiman (2021) mengemukakan bahwa hipotesis

penelitian adalah pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya menduga tetapi didasari oleh teori- teori atau temuan terdahulu. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Parsial

- a. *Foreign Direct Investment*

H_0 : *Foreign Direct Investment* tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

H_1 : *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

- b. *Trade Openness*

H_0 : *Trade Openness* tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

H_2 : *Trade Openness* berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

- c. Pengeluaran Pemerintah

H_0 : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

H_3 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

- d. Nilai Tukar

H_0 : Nilai Tukar tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

H_4 : Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto

2. Secara Bersama-sama

H_0 : Secara bersama-sama *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023

H_1 : Secara bersama-sama *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023